

KUALITAS PEMBELAJARAN APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BOGOR

THE QUALITY OF APARATURE LEARNING IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE GOVERNMENT IN BOGOR REGENCY

Sitti Aminah

Badan Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia
Jalan Kramat Raya No. 132, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia
e-mail: sitti Aminah.kemendagri@gmail.com
Diserahkan: 28/02/2018, Diperbaiki: 16/03/2018, Disetujui: 23/05/2018

Abstrak

Kemampuan sumberdaya manusia aparat pemerintah desa dinilai kurang memadai untuk melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan kajian adalah menganalisis ketepatan proses pembelajaran dalam program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa atau PKAD. Data dikumpulkan pada bulan Agustus dan September 2016 di Kabupaten Bogor dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa ketepatan proses pembelajaran diklat PKAD tergolong cukup memadai. Rekomendasi kajian adalah melakukan perbaikan program diklat PKAD melalui peningkatan sarana dan fasilitas belajar, penyesuaian metode belajar dengan memperbanyak praktek terutama untuk materi pengelolaan keuangan desa, menambah lamanya waktu belajar dan meningkatkan dialog dan berbagi pengetahuan diantara peserta dan fasilitator serta meningkatkan kualitas fasilitator.

Kata kunci: kualitas pembelajaran, sumberdaya manusia, aparatur pemerintah desa.

Abstract

The ability of human resources of the village government apparatus is considered inadequate to carry out the authority stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The study aims to analyze the accuracy of the learning process in increasing capacity of village government apparatus program or PKAD. Data were collected in August and September 2016 in Bogor regency and analyzed using descriptive statistics. The results of the study show that the accuracy of the learning process of PKAD training is an adequate category. The study recommends improving the learning facilities, adjustment of the learning method by increasing practices, especially for village financial management materials, adding time of training and improving intensity both dialogue and sharing knowledge among participants and facilitators also improving the quality of facilitators.

Keywords: quality of learning, human resources, the village government apparatus.

PENDAHULUAN

Kualitas sumberdaya manusia aparatur menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah hingga desa. Di tingkat desa, keberhasilan pembangunan desa untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bergantung pada kualitas sumberdaya manusia aparatur desa. Kesiapan sumberdaya manusia pemerintah desa semakin dituntut dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Paradigma baru yang diusung UU Desa membawa perubahan orientasi pemerintahan dan pembangunan yang semula desa merupakan objek pembangunan, menjadi desa sebagai subjek pembangunan yang mengandalkan kemampuan sendiri. Implementasi UU desa membawa konsekwensi semakin besarnya tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah desa dalam menjalankan aktifitas pemerintahan dan pembangun-

an. Pemerintah desa dituntut mampu mengelola dan memper-tanggungjawabkan semua kewenangan manajerial dan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.

Namun, banyak kalangan meragukan kemampuan aparatur pemerintah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah Desa dianggap belum siap pada aspek kemampuan normatif, manajerial dan teknis untuk melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Hasil kajian LAN (2009) menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur pemerintah desa rendah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran desa, mengelola keuangan dan kekayaan desa, menyusun peraturan desa, kepemimpinan dan manajemen pelayanan desa.

Ketidaksiapan aparatur desa dalam melaksana-

kan pemerintahan desa tampak dari beberapa kajian yang dilakukan antara lain oleh KPK Tahun 2014, kajian ini menemukan bahwa salah satu penyebab penyalahgunaan dana desa adalah kemampuan sumberdaya aparat yang rendah dalam pengelolaan dana desa. Kajian KPK Tahun 2015 juga menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan keuangan desa antara lain disebabkan oleh kurangnya kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan APBD. Penyusunan APBD sering tidak relevan dengan kebutuhan desa, penyusunan rencana dan pertanggungjawaban APBD Desa serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai standar dan rawan manipulasi. Kajian Badan Litbang Kemendagri Tahun 2015 antara lain menemukan bahwa beberapa desa tidak melaporkan penggunaan Dana Desa karena ketidakmampuan SDM aparat desa dalam menyusun Laporan pertanggungjawaban. Sementara Fitri (2015) menemukan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tidak berjalan efektif, karena perbedaan pemahaman antara aparat desa dalam penyusunan program desa serta kurang transparannya aparat desa dalam pelaksanaan program. Damayanti *et.al.* (2014), menemukan, salah satu faktor penghambat pengembangan kampug ekowisata akibat dari sumberdaya manusia pemerintah desa tidak memadai.

Menyadari rendahnya sumberdaya manusia paratur pemerintah desa, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan program peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa (PKAD). Program bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa secara bertahap dan berkelanjutan melalui pelatihan. Sasaran program PKAD adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Peningkatan kapasitas terutama pada kemampuan manajemen pemerintahan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, penyusunan peraturan desa dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa, dan pengelolaan keuangan desa. Program ini telah dilaksanakan sejak Tahun 2015 dengan materi pembelajaran mencakup: manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan desa termasuk revolusi mental aparat desa (Kementerian Dalam Negeri, 2015).

Berkaitan dengan penyelenggaraan program PKAD dimaksud, kajian bertujuan untuk menganalisis ketepatan proses pembelajaran aparatur desa dalam pelaksanaan PKAD. Hasil kajian akan menjadi masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dalam Program Pelatihan PKAD.

Konsep pemebelajaran digunakan untuk menganalisis proses pembelajaran bagi aparat pemerintah desa pada program PKAD Tahun 2015.

Winkel (2006) mendefinisikan belajar sebagai suatu aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, ketrampilan dan nilai-sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas. Perubahan-perubahan itu dapat berupa suatu hasil yang baru atau pula penyempurnaan terhadap hasil yang telah diperoleh.

Belajar sebagai hasil merupakan upaya yang disengaja oleh seseorang yang bertujuan untuk mencapai tujuan belajar (Sudjana, 2000). Klausmeier dan Goodwin (1971) menyebutkan bahwa dalam proses belajar, kualitas interaksi antara guru dan murid, murid dan murid, guru dan guru serta guru dan pegawai mempengaruhi hasil belajar. Interaksi guru dan murid sangat dipengaruhi oleh hubungan interpersonal, komunikasi verbal dan non verbal. Interaksi guru dan murid terjadi jika ada komunikasi dua arah dan seimbang. Marzano (2000) mengemukakan tujuan utama dari pembelajaran adalah membelajarkan pembelajar. Kegiatan belajar akan efektif jika melalui lima dimensi belajar yaitu: (1) Memiliki sikap dan persepsi positif terhadap belajar; (2) Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan serta membangun sikapnya; (3) Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan ketrampilan serta memantapkan sikapnya; (4) Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikapnya secara bermakna; dan (5) Mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap dan bekerja produktif.

Agar proses belajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, Klausmeier dan Goodwin (1971) menyebutkan ada sembilan faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu: (1) Tujuan belajar, proses belajar dipengaruhi oleh tujuan pembelajaran, apa yang diharapkan dan diinginkan dari proses pembelajaran tersebut; (2) Materi pembelajaran Setiap orang yang belajar, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan pada suatu bidang tertentu. Semakin dewasa orang yang belajar cenderung akan mendekati suatu minat atau keahlian dalam suatu bidang tertentu; (3) Media dan teknologi dalam pembelajaran Bangunan sekolah dilengkapi dengan perlengkapan audio, audio visual, komputer, ruangan untuk kegiatan belajar kelompok dan lainnya; (4) Karakteristik dan perilaku orang yang belajar. Untuk memperoleh proses belajar yang efektif sangat ditentukan oleh karakteristik dan perilaku orang yang belajar baik kemampuan pengetahuan/intelektual, kemampuan psikomotorik dan fisik serta karakteristik sikap; (5) Karakteristik pengajar Kemampuan intelektual, ketrampilan dan sikap guru sangat berpengaruh terhadap efektifnya suatu proses belajar;

(6) Interaksi pengajar dan orang yang belajar Interaksi pengajar dan orang yang belajar diantaranya ialah bagaimana komunikasi antara pengajar dan yang diajar, bagaimana cara pengajar menerangkan atau mengajar dan lainnya; (7) Organisasi, organisasi kependidikan baik penyelenggaraan pendidikan, maupun organisasi keprofesian guru; (8) Karakteristik fisik, seperti ruangan, sarana dan fasilitas lembaga pendidikan sangat menentukan keberhasilan proses belajar; dan (9) Hubungan rumah-sekolah dan komunitas, sekolah menjalankan fungsi sosial dimana rumah dan tetangga dimana murid berasal memberikan pengaruh terhadap proses belajar.

Terkait dengan paradigma pembelajaran, Freire (1969;1984) mengkritik metode pembelajaran yang menerapkan ideologi struktur hirarkhis, vertikal, kontrol sosial dan hubungan satu arah dari para ahli kepada mereka yang dibantu dan pada dasarnya tidak partisipatif. Tujuan pendidikan adalah “mengisi” dengan “pengetahuan” baik teknis maupun yang lain, yang disebut sebagai “*Banking Concept Education*”... Freire (1984) memberikan perhatian pada proses belajar yang dialogis atau interaktif antara guru dan murid. Guru dan murid sama-sama menjadi subyek dalam proses belajar. Proses belajar diawali dengan penyadaran warga belajar secara bertahap atas masalah yang dihadapi, sehingga warga belajar mampu menafsirkan masalah, mampu merefleksikan dan melihat hubungan sebab akibat permasalahan yang dihadapinya dengan kondisi dan realitas yang ada, serta dapat mengambil tindakan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Meiliyana dan Hermawan (2012) mengkaji pelatihan aparatur pemerintah desa. Penelitian menggunakan metode *pre test* dan *post test*, hasil kajian menemukan bahwa setelah pembelajaran, ada peningkatan pengetahuan aparat desa tentang manajemen kelembagaan, mekanisme dan tata aturan penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Asrori (2014) mengkaji tentang dampak pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dengan menggunakan metode

statistik deskriptif, kajian menemukan bahwa tingkat pemahaman aparatur pemerintah desa tergolong rendah tentang manajemen sumber daya manusia dan kemampuan teknis pengelolaan keuangan desa, penyusunan peraturan desa dan perencanaan desa. Hal ini mempengaruhi kemampuan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan desa. Kajian pembelajaran aparatur pemerintah desa yang dilakukan oleh Alam (2016), menunjukkan bahwa metode studi banding, sosialisasi peraturan baru dan asistensi jangka pendek tidak efektif meningkatkan profesionalisme aparat desa, sehingga program pengembangan sumberdaya manusia aparatur tidak berkontribusi banyak pada implementasi tanggungjawab, pengembangan pelayanan publik pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, belum ada kajian yang menganalisis tentang aspek yang menentukan kualitas pembelajaran pada aparatur pemerintah desa. Kajian ini menggunakan aspek-aspek yang menentukan kualitas pembelajaran aparatur desa dengan merujuk pada Klausmeier dan Goodwin (1971). Ketepatan proses pembelajaran dalam Diklat PKAD diukur dari: ketersediaan dan kesesuaian materi, ketepatan metode, kesesuaian model komunikasi, intensitas pembelajaran dan kesiapan fasilitas belajar, seperti disajikan pada Tabel 1.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis ketepatan proses pembelajaran, kajian didesain sebagai penelitian survey dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Lokasi kajian di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor dipilih dengan pertimbangan respon pemerintah setempat yang sangat tinggi untuk mengikutsertakan aparat pemerintah desa dalam Program PKAD. Pemilihan lokasi juga karena pertimbangan keterbatasan peneliti dalam hal dana, daya dan waktu penulisan.

Untuk memperoleh variasi data responden aparat desa diambil dari 3 (tiga) wilayah pembangunan, Barat, Tengah dan Timur (RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2015), dengan karakteristik wilayah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator, Definisi Operasional, Parameter Dan Kategori Pengukuran Ketepatan Proses Pembelajaran

| Indikator | Definisi operasional | Parameter pengukuran | Kategori pengukuran |
|--------------------------------------|--|---|---|
| a Ketersediaan dan kesesuaian materi | Kecukupan jumlah, jenis dan manfaat materi dalam memenuhi kebutuhan belajar aparat desa | Diukur dari: 1. Kecukupan jumlah dan jenis materi. 2. Keragaman bentuk materi 3. Kesesuaian materi dengan kebutuhan perangkat desa | 1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi |
| b Ketepatan Metode | Ketertarikan, kemudahan aparat dalam mengikuti metode belajar yang diterapkan | Diukur dari 1. Ketertarikan aparat desa pada metode pembelajaran yang digunakan 2. Kemudahan aparat mengikuti metode pembelajaran. 3. Kesesuaian metode dengan kebutuhan pemerintahan desa | 1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi |
| c Kesesuaian Model Komunikasi | Kemudahan menangkap pesan/informasi, ketertarikan aparat, kemampuan fasilitator berinteraksi dengan aparat dan interaksi antar peserta | Diukur dari: 1. Kesesuaian model komunikasi yang digunakan 2. Kemampuan model komunikasi meningkatkan hubungan dengan aparat desa. 3. interaksi antar peserta dalam proses belajar untuk saling bertukar ide dan pengalaman. | Skor terkoreksi: 1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi |
| d Intensitas Belajar | Frekwensi pembelajaran aparat dengan pihak-pihak yang yang mendukung pembelajaran pemerintahan desa | Diukur dari: 1. Frekwensi menerima pembelajaran dari pemerintah Kecamatan/Kabupaten/Provinsi 2. Frekwensi menerima pembelajaran dari Pemerintah Pusat 3. Frekwensi menerima pembelajaran dari lembaga NGO. | Skor terkoreksi: 1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi |
| e Kesiapan Fasilitator | Kesiapan fasilitator | Dihitung berdasarkan skor 1. Penguasaan teknik pembelajaran 2. Kecukupan jumlah 3. Memiliki kemampuan menggugah minat belajar. | 1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi |
| f. Ketersediaan Fasilitas | Ketersediaan fasilitas pelatihan dan | Dihitung berdasarkan skor 1. Ketersediaan fasilitas belajar 2. Ketersediaan saranapendukung proses belajar. | 1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi |

Sumber: hasil analisis

- (1) WP Barat dengan 13 kecamatan sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan, pertambangan dan energi, pariwisata serta pendidikan dan penelitian.
- (2) WP Tengah dengan 20 kecamatan, sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pemerintahan dan penelitian, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum dan sosial, industri ramah lingkungan, perikanan, pariwisata dan budaya, serta konservasi wilayah hulu.
- (3) WP Timur dengan 7 kecamatan sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian dan peternakan, pertambangan dan pariwisata.

Populasi kajian adalah 417 desa yang tersebar di Kabupaten Bogor. Adapun cara pengambilan sampel sebagai berikut: Populasi dikelompokkan menjadi tiga wilayah pembangunan yang memiliki karakteristik yang relatif berbeda, yaitu wilayah pembangunan barat, tengah dan timur dengan jumlah desa secara keseluruhan adalah 417 desa. Populasi diambil secara acak sederhana yaitu desa dalam setiap wilayah sebanyak 10% dari jumlah desa sewilayah

pembangunan tersebut. Selanjutnya dari 10% desa pada setiap wilayah pembangunan, ditarik sampel secara purposif aparat yang telah mengikuti program PKAD Tahun 2015. Dari setiap desa sampel diambil 3 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Sampai dengan akhir pengumpulan data, hanya ada 53 responden yang mewakili wilayah pembangunan barat, tengah dan timur, disajikan pada Tabel 2.

Pengumpulan data Bulan Juli 2016 selama 7 hari (1 minggu). Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan SPSS 19, instrumen untuk keperluan penelitian telah valid dan reliabel, ditunjukkan dengan nilai reliabilitas *alpha Cronbach* (Lihat Tabel 3).

Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif, kepentingan pengujian secara statistik dengan melakukan transformasi agar semua data yang terkumpul memiliki kisaran yang sama, yaitu 0 – 100. Mengacu pada Sumardjo (1999), pedoman transformasi dapat dilakukan dengan menentukan nilai indeks terkecil diberikan untuk jumlah skor terendah dan nilai 100 untuk jumlah skor tertinggi dari tiap indikator. Transformasi semacam ini digunakan untuk menghitung nilai keragaman yang terjadi dalam setiap variabel penelitian ini, terutama yang berskala ordinal menjadi interval atau rasio.

Rumus umum transformasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Transformasi Indeks Variabel diperoleh dari:

Tabel 2. Teknik Penarikan Sampel

| No | Wilayah | Jumlah Desa | Proporsi | Jumlah Desa | Desa Sampel (Peserta PKAD, 50%) | Responden (Kades, Sekdes dan Bendahara) |
|----|--------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------------|---|
| 1 | Pembangunan Barat | 156 | 10% | 15 | 7 | 18 |
| 2 | Pembangunan Tengah | 186 | 10% | 18 | 9 | 24 |
| 3 | Pembangunan Timur | 75 | 10% | 8 | 4 | 11 |
| | Jumlah | 417 | 10% | 41 | 20 | 53 |

Sumber : Hasil analisis

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Instrument

| Variabel | Validitas | | Reliabilitas | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------------|------------------|-----------------|
| | Nilai Rhitung | Rtabel | Keterangan | Cronbach's Alpha | Keterangan |
| Ketepatan proses pembelajaran | 0,219-0,914 | 0,707 | Valid | 0,947 | Sangat reliabel |

Sumber : Hasil analisis

$$\frac{\text{Jumlah skor yang dicapai} - \text{Jumlah skor minimum yang diharapkan}}{\text{Jumlah skor maksimum yang diharapkan} - \text{skor minimum yang diharapkan}} \times 100$$

Keterangan: selang nilai indeks variabel 0 - 100

Dalam kajian ini, pengukuran indikator menggunakan parameter skala 1-4, sehingga nilai indeks transformasi minimum (0) dicapai bila semua parameter setiap indikator yang diukur bernilai 1. Sedangkan nilai maksimum (100) bila semua parameter setiap indikator bernilai 4, sehingga sebaran data merupakan skala interval dengan nilai berkisar antara 0-100. Pengelompokan kategori menggunakan tiga tingkatan yaitu: nilai 0-50 kategori "rendah", 51-75 kategori "sedang", dan 76-100 kategori tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian ketepatan proses pembelajaran aparatur desa, mencakup ketersediaan dan kesesuaian materi, kesesuaian metode pembelajaran, kesesuaian model komunikasi, intensitas pembelajaran, kesiapan fasilitator dan kesiapan fasilitas, disajikan pada Tabel 4.

Ketersediaan dan Kesesuaian Materi

Kesesuaian materi dengan kebutuhan informasi aparat desa berada pada kategori sedang (rata-rata skor 72). Kesesuaian materi dilihat dari ragam, kebutuhan dan kebermanfaatannya bagi aparat desa. Materi Diklat PKAD mencakup: (1) Manajemen pemerintahan desa, dengan sub materi: (1) Kebijakan tata kelola pemerintahan desa dan revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan desa. (2) Perencanaan pembangunan desa, terdiri dari sub materi: Konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa dan Teknik penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa. (3) Pengelolaan keuangan desa, dengan sub materi: perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan/pertanggungjawaban keuangan desa; dan (4) Penyusunan peraturan di desa.

Materi yang diajarkan dalam Diklat PKAD sesuai dengan kebutuhan aparat desa untuk

Tabel 4. Sebaran Sampel Persentase Berdasarkan Ketepatan Proses Diklat

| Karakteristik Aparat desa | Kategori | Wilayah Barat n=15 | Wilayah Tengah n=25 | Wilayah Timur n=13 | Total n=53 | Sig (Uji t) |
|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Kesesuaian materi | Rendah | 60 | 8 | 69 | 4 | 0,621 |
| | Sedang | 40 | 60 | 31 | 62 | |
| | Tinggi | 0 | 32 | 0 | 34 | |
| | Rataan | 78 | 68 | 72 | 72 | |
| Ketepatan Metode | Rendah | 7 | 32 | 31 | 25 | 0,172 |
| | Sedang | 67 | 64 | 69 | 66 | |
| | Tinggi | 24 | 4 | 0 | 9 | |
| | Rataan | 67 | 50 | 57 | 57 | |
| Kesesuaian Model Komunikasi | Rendah | 7 | 20 | 31 | 19 | 0,207 |
| | Sedang | 80 | 48 | 54 | 58 | |
| | Tinggi | 13 | 31 | 15 | 23 | |
| | Rataan | 64 | 61 | 54 | 60 | |
| Intensitas Pembelajaran | Rendah | 27 | 60 | 54 | 49 | 0,808 |
| | Sedang | 60 | 28 | 38 | 40 | |
| | Tinggi | 13 | 12 | 8 | 11 | |
| | Rataan | 62 | 44 | 46 | 50 | |
| Kesiapan Fasilitator | Rendah | 20 | 40 | 54 | 38 | 0,705 |
| | Sedang | 67 | 56 | 46 | 57 | |
| | Tinggi | 13 | 4 | 0 | 6 | |
| | Rataan | 58 | 46 | 38 | 47 | |
| Kesiapan Fasilitas | Rendah | 0 | 20 | 0 | 9 | 0,090 |
| | Sedang | 100 | 68 | 100 | 85 | |
| | Tinggi | 0 | 12 | 0 | 6 | |
| | Rataan | 61 | 53 | 61 | 57 | |

Sumber: hasil analisis

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun aparat desa mengungkapkan beberapa kelemahan dari aspek materi belajar PKAD dimana materi pembelajaran cenderung disampaikan untuk mencapai target sesuai jadwal dan kurang memperhatikan adanya kesempatan untuk mendiskusikan kesesuaian materi ajar dengan kompleksitas masalah dan isu-isu yang dihadapi aparat desa.

Kesesuaian Metode Pembelajaran

Kesesuaian metode pembelajaran tergolong sedang dengan rata-rata skor 57. Kesesuaian metode dipersiapkan oleh aparat desa di wilayah Bogor Tengah lebih rendah (rata-rata skor 50) dibandingkan wilayah barat dan timur, masing-masing dengan rata-rata skor 67 dan 57 (kategori sedang).

Beragam metode diterapkan dalam Diklat, yaitu: ceramah, diskusi, praktek dan kerja kelompok termasuk pemutaran *videographic* yang membantu peserta memahami materi yang akan disampaikan pelatih. Namun aparat desa mengaku proses pembelajaran kurang menarik dan cenderung membuat jenuh. Hal ini karena kelemahan dalam penerapan metode belajar, yaitu: pertama, meski ada praktek dalam penyampaian materi, tetapi masih sangat terbatas, padahal menurut aparat desa, mereka sangat membutuhkan praktek penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa dan terutama praktek pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Banyak kades dan sekdes yang mengaku minim pengetahuan pengelolaan keuangan desa, sehingga sangat tergantung pada kemampuan bendahara desa, sehingga praktek merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa sangat penting untuk membantu mereka mencapai tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang memadai agar tidak melakukan kekeliruan dalam mengelola dana desa.

Dari aspek kesiapan media dan alat bantu, terdapat aparat desa yang mengaku, panitia kurang siap dalam penyiapan kelas, misalnya mereka terlambat mengatur pembagian kelas termasuk menyediakan alat bantu utama pembelajaran seperti spidol, kertas, alat perekat dan lainnya. Akibatnya waktu belajar tidak efektif, karena terlambat memulai pembelajaran.

Kesesuaian Model Komunikasi

Kesesuaian model komunikasi berada pada kategori sedang dengan rata-rata skor 60. Penerapan model komunikasi dua arah telah dilakukan yaitu dengan memberikan ruang bagi peserta bertanya kepada pelatih terhadap hal-hal yang belum dipahami dan berdiskusi terhadap topik yang disediakan oleh pelatih sesuai materi ajar.

Penerapan pendekatan andragogi telah

dilakukan dan metode diskusi kelompok cukup baik, namun pada saat diskusi, pendekatan andragogi kurang diterapkan untuk menggali pengalaman dan kemampuan aparat desa untuk mengidentifikasi isu dan masalah serta menemukan solusi, terutama yang berkaitan isu-isu implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya. Diskusi yang mendorong terjadinya saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar peserta diklat belum memadai

Selain itu terjadi kesenjangan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh peserta (kades, sekdes dan bendahara). Kehadiran peserta diklat yang terdiri dari unsur kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, memiliki substansi pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbeda-beda sesuai tingkatan dalam manajemen pemerintahan desa yang bersifat strategis dan teknis. Sementara materi disampaikan secara merata, sebagian besar kepala desa susah memahami hal-hal teknis yang menyangkut pengelolaan keuangan desa, sementara di sisi lain, bendahara desa yang lebih menguasai hal-hal teknis kurang dalam hal pemahaman substansi materi lainnya.

Intensitas Pembelajaran

Intensitas pembelajaran atau rentang waktu yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran tentang penyelenggaraan pemerintahan desa berada pada kategori sedang dengan rata-rata skor 50. Namun, ketika dirinci per wilayah, ternyata wilayah Tengah dan Timur berada pada kategori rendah dengan rata-rata skor masing-masing 44 dan 46. Skor demikian menunjukkan bahwa intensitas (lamanya) pembelajaran kurang memadai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat desa belum sepenuhnya memahami materi yang disampaikan, karena waktu pembelajaran yang terbatas, yakni hanya 5 hari kerja. Menurut peserta, alokasi waktu ajar untuk materi pengelolaan keuangan desa dan penyusunan dokumen perencanaan desa dirasakan sangat kurang, sehingga mereka hanya menangkap materi dari "kulitnya" saja belum mendalam hingga mereka tahu dan trampil dalam pengelolaan keuangan desa dan menyusun perencanaan didesa. Padahal bagi aparatur keuangan desa dan penyusunan perencanaan desa sangat penting dan menjadi isu pokok penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini.

Kesiapan Fasilitator

Fasilitator atau pelatih pada Diklat PKAD dipersiapkan oleh aparat desa berada pada kategori rendah dengan rata-rata skor 47. Kecuali wilayah Barat yang mempersiapkan kesiapan fasilitator pada kategori sedang, aparat di wilayah tengah dan timur mempersiapkan kesiapan fasilitator berada pada kategori rendah, masing-masing rata-rata skor 46 dan 38.

Kondisi ini dapat dijelaskan berikut: pertama, aparat menilai fasilitator kurang menguasai materi pembelajaran. Diantara empat materi pokok yang diajarkan dalam Diklat (tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan peraturan desa), materi pengelolaan keuangan desa dianggap “berat” karena berkaitan dengan teori dan praktek pengelolaan keuangan, mulai dari cara membuat rencana anggaran biaya (RAB), menyusun buku kas, menghitung pajak dan membuat pelaporan keuangan. Kedua, setiap kelas dijadwalkan untuk tiga orang pelatih, namun sering hanya diisi oleh 2 (dua) orang pelatih, bahkan ada kelas yang hanya diisi oleh 1 (satu) orang pelatih karena pelatih lainnya berhalangan atau terlambat hadir di tempat diklat. Ketiga, asal pelatih dari daerah lain tidak efektif dalam pembelajaran karena kurang menguasai isu-isu pemerintahan desa yang dihadapi aparat desa di Kabupaten Bogor. Ketidakhahaman pelatih tentang isu-isu pemerintahan dan kondisi sosial budaya masyarakat juga menyebabkan pembahasan sering di luar konteks pemerintahan di Kabupaten Bogor.

Kesiapan Fasilitas Pendukung

Kesiapan fasilitas diklat berada pada kategori sedang dengan rata-rata skor 57. Aparat desa mempersepsikan fasilitas diklat memadai dilihat dari ketersediaan kelas dan sarana pendukung belajar di kelas. Diklat dilakukan ruangan hotel yang disiapkan oleh BPMPD sebagai penyelenggara diklat PKAD Provinsi Jawa Barat. Ruangan dilengkapi dengan peralatan untuk proses belajar mengajar dan diatur dalam posisi yang memberikan ruang bagi peserta

untuk saling berinteraksi dalam proses belajar. Namun, berdasarkan wawancara, sampai dengan saat pelaksanaan pelatihan, beberapa peserta mengatakan buku panduan belum dibagikan kepada peserta baik hardcopy dan softcopy. Panitia penyelenggara di tiap kelas dinilai kurang siap, karena sering lambat dalam merespon kebutuhan pembelajaran di kelas, misalnya ketika pelatih membutuhkan alat tulis menulis untuk kelancaran pembelajaran, kerap lamban dipenuhi.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, kajian ini mengungkapkan adanya indikator-indikator pada variabel ketepatan proses pembelajaran yang berada pada kategori rendah, sedang dan tinggi seperti disajikan pada Tabel 5.

Hasil analisis sebagaimana disajikan pada Tabel 5, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator dengan rata-rata skor rendah atau “kurang kuat” kualitas proses pembelajaran merupakan aparat desa di wilayah Barat dan Timur. Pada aspek metode, peserta menjadi jenuh hanya dengan penyampaian materi pembelajaran dengan metode ceramah dan diskusi karena mereka lebih senang jika fasilitator langsung praktek untuk menyusun rencana, mengelola keuangan desa dan menyusun Peraturan Desa. Intensitas waktu pelatihan yang singkat perlu diperpanjang, mengingat materi banyak dan padat tapi waktu yang digunakan hanya 5 hari, sehingga peserta kurang memahami isi materi. Kuantitas dan kualitas Fasilitator juga dipersepsikan lemah dalam mengantarkan pembelajaran kepada peserta diklat.
2. Indikator dengan rata-rata skor sedang atau

Tabel 5. Kondisi Kekuatan Indikator Ketepatan Proses Pembelajaran

| Wilayah Pembangunan | Kategori | | |
|---------------------|---|---|---|
| | Rendah ("kurang kuat") | Sedang ("agak kuat") | Tinggi ("kuat") |
| Wilayah Barat | • | <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan metode • Ketepatan model • Komunikasi • Intensitas pembelajaran • Kesiapan fasilitas/sarana | <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian materi |
| Wilayah Tengah | <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan metode • Intensitas pembelajaran • Kesiapan fasilitator | <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian materi • Kesesuaian model komunikasi • Kesiapan sarana/fasilitas | |
| Wilayah Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Intensitas • Intensitas Pembelajaran • Kesiapan fasilitator | <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian materi • Ketepatan metode • Kesesuaian model komunikasi • Kesiapan sarana/fasilitas | |

Sumber: hasil analisis

“agak kuat” dalam proses pembelajaran sebagaimana dipersepsikan oleh aparat desa di wilayah Barat adalah: metode wawancara dan diskusi sudah cukup efektif dan mereka pahami apa yang diajarkan namun perlu praktek untuk pengelolaan keuangan, menyusun perencanaan dan peraturan desa. Model komunikasi dua arah telah terbangun antara pelatih dengan peserta namun perlu lebih pada berbagi pengalaman antar peserta, terutama, peserta yang dinilai telah memahami dan melaksanakan pengelolaan keuangan di desa mereka. Penilaian terhadap intensitas pembelajaran cukup namun perlu ada penambahan jumlah jam dan menyiapkan sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran.

3. Indikator dengan rata-rata skor tinggi atau “kuat” dalam proses pembelajaran adalah kesesuaian materi. Materi dinilai oleh aparatur sudah sesuai dengan kebutuhan mereka dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa di wilayah Tengah dan Timur, menilai ketepatan proses pembelajaran ada di kategori rendah dan sedang, sedangkan aparat di wilayah Barat mempersepsikan ketepatan proses pembel-

ajaran berada pada kategori sedang. Beberapa aspek yang diperkirakan menjadi penyebab perbedaan persepsi adalah tingkat pendidikan (formal dan informal) dan pengalaman sebagai bekerja sebagai aparat desa (Lihat Tabel 6).

Aparat pemerintah desa di Wilayah Tengah dan Timur memiliki rata-rata tingkat pendidikan formal dan informal yang lebih tinggi daripada di wilayah Barat. Demikian juga dengan pengalaman lamanya bekerja sebagai aparat desa. Ada kecenderungan perbedaan kualifikasi pendidikan dan pengalaman tersebut membedakan persepsi diantara aparat di ketiga wilayah pembangunan tentang ketepatan proses pembelajaran dalam Program PKAD.

Hasil kajian diharapkan menjadi input bagi administrator program untuk melakukan perbaikan pada aspek-aspek pembelajaran aparat desa meningkatkan kualitas program PKAD. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dymnicki, *et al* (2014) bahwa agar aparat siap dalam menjalankan tugas dan wewenang, maka para penyedia training atau administrator program semakin dituntut untuk memperbaiki program pembelajaran dan praktek-praktek baru untuk meningkatkan kapasitas pembelajar.

Tabel 6 Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa

| Karakteristik | | n=15 | Wilayah Tengah n=25 | Wilayah Timur n=13 | Total n=53 | Sig (Uji t) |
|--|-----------------|------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Pendidikan Formal (Tahun) | SD (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SMP(7-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SMA(12-15) | 73 | 68 | 69 | 70 | 0,93 |
| | PT (12-16) | 27 | 32 | 31 | 30 | |
| Rataan | | 13 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | |
| Pendidikan Informal (jumlah diklat dalam 5 tahun terakhir) | Rendah (<2) | 46 | 40 | 38 | 42 | |
| | Sedang (2 -5) | 54 | 60 | 61 | 58 | 0,049* |
| | Tinggi (>5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rataan | | 1,7 | 1,8 | 2 | 1,9 | |
| Pengalaman Kerja (Tahun) | Rendah (0-<10) | 87 | 56 | 70 | 67 | |
| | Sedang (11-<20) | 13 | 20 | 15 | 18 | 0,126 |
| | Tinggi (>20) | 0 | 24 | 15 | 15 | |
| | | 4 | 10 | 8 | 8 | |

Sumber: hasil Analisis

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Ketepatan proses pembelajaran diklat PKAD tergolong cukup memadai namun perlu peningkatan pada aspek: kesesuaian materi diklat dengan kebutuhan aparat pemerintah desa, kesesuaian penerapan metode belajar yang dibutuhkan, penerapan model komunikasi yang tepat, serta kesiapan fasilitas dan sarana belajar, juga penting untuk memastikan kemampuan fasilitator untuk memfasilitasi pembelajaran dalam pelaksanaan diklat PKAD. Terdapat perbedaan persepsi ketepatan proses pembelajaran antara aparat pemerintah desa di wilayah Barat dan di wilayah Tengah dan Timur. Aparatur di wilayah Barat menilai proses pembelajaran cukup tepat, sedangkan aparat di wilayah Tengah dan Timur menilai proses pembelajaran kurang tepat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian, rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran aparat pemerintah desa, sebagai berikut:

Pertama, melakukan penyiapan sarana dan fasilitas belajar sebelum pelaksanaan pelatihan dalam bentuk buku panduan, baik *hardcopy* dan *softcopy* yang mudah dipelajari oleh aparat desa, juga meningkatkan kesiapan panitia penyelenggara diklat PKAD.

Kedua, perbaikan metode belajar bagi aparat desa dengan memperbanyak praktik dalam pengelolaan keuangan desa (mencakup merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan keuangan desa), perencanaan pembangunan desa yakni cara menyusun dokumen RPJMDesa dan RKP Desa serta cara mengatasi permasalahan di desa. Penerapan metode praktik dinilai tepat karena mudah dipahami dan diingat peserta pelatihan.

Ketiga, penambahan intensitas waktu pelaksanaan Diklat PKAD yakni yang semula hanya lima hari, sebaiknya ditambah menjadi dua minggu dan disesuaikan dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan tinggi mendapat waktu yang lebih lama. Termasuk menambah jumlah diklat-diklat tentang pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa di tingkat kabupaten dan kecamatan; Keempat, meningkatkan kemampuan fasilitator atau pelatih PKAD serta melakukan seleksi ketat sebelum memilih fasilitator agar dapat melakukan penyesuaian aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat pendidikan formal dan informal aparat desa juga pengalaman yang dimiliki mereka. Perlu dipertimbangkan agar fasilitator berasal dari daerah yang sama dengan asal para peserta. Hal ini untuk memudahkan membahas isu-isu lokal dan menemukan solusi yang tepat.

Kelima, memperbaiki model komunikasi dengan memberikan kesempatan yang luas bagi peserta saling berbagi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Hal ini sangat penting mengingat keragaman masalah yang diatasi dan perbedaan posisi jabatan peserta. Terakhir, mengingat perbedaan kapasitas manajerial pemerintahan antara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, maka perlu pembagian kelas untuk memberikan penguatan pada aspek manajerial dan teknis. Penguatan pada aspek manajerial ditujukan kepada kepala desa, sementara untuk sekretaris desa penguatan manajerial dan teknis secara seimbang, kemudian untuk bendahara, penguatan pembelajaran pada aspek teknis. Namun, untuk ketiganya (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara) tetap ada standar penguasaan materi baik untuk materi tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan dan manajemen keuangan desa. Langkah selanjutnya mereka dapat digabungkan di akhir sesi pembelajaran untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Bapak Drs. Dodi Riyadmadji, MM yang memberikan kesempatan dan dukungan atas terlaksananya kajian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah memfasilitasi kami selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang belum kami sebutkan yang ikut membantu dalam penyelesaian kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori. 2014. "Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus". Jurnal Bina Praja BPP Kemendagri, Vol 6 (No 2).
- Antono, Herry P.A. 2015. "Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa". Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V (No 1).
- Alam, HV. 2016. "Human Resource Development Strategies for Village Apparatus in Realizing Effective Village Governance at Boalemo Regency, Gorontalo Province. The International Journal Of Engineering And Science (IJES) Volume 5 (No 1).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. 2015. "Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah". Jakarta, BPP Kemendagri.
- Damayanti Erlin, Soeaidy MS, Ribawanto H. 2014.

- “Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal”. *Jurnal Administasi Publik (JAP)*, Vol 2 (No 3).
- Dymnicki, A. 2014. “ASPE Issue Brief : Willing, Able, Ready: Basics And Policy Implications Of Readiness As a Key Component For Implementation Of Evidence-Based Interventions”. Department of Health and Human Services, Washington DC.
- Fitri.2015. “Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi” e-Jurnal Katalogis, Volume 3 (No 11)
- Freire P. 1969. “Education for Critical Consciousness”. The Seabury Press, New York.
1984. “Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan” (Terj). PT Gramedia, Jakarta.
- Indonesia Anti Corruption Forum (IFC).2014. “Potensi Penyalahgunaan Wewenang Dana Desa dan Rekomendasi”. Disampaikan pada Seminar IACF tanggal 10-12 Juni 2014 di Hotel Double Tree, Jakarta.
- Klausmeier HJ, Goodwin W. 1971. “Learning and Human Abilites: Educational Psychology”. Fourth Ed. Harper & Row Publisher, New York.
- Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (ICF). 2015. “Kajian Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi dana Desa Tahun 2015”. KPK, Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2015. “Modul Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa”. Bina Pemerintahan Desa, Jakarta.
- LAN.2009. “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa”. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-LAN, Jakarta.
- Meiliyana, Mulyana N dan Dedy Hermawan.2012. “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Manajemen Kelembagaan Desa Bagi Sekretaris Desa”. Skripsi, Universitas Lampung, Lampung.
- Marzano RJ. 2000. “Designing a New Taxonomy of Educational Objectives”. Corwin Press, Thousand Oaks, California.
- Sudjana SHD. 2000. “Strategi Pembelajaran”. Falah Production, Bandung.
- Sumardjo. 1999. “Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani”. Disertasi Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Winkel, W.S. 2006. “Psikologi Pengajaran” Edisi Revisi. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

